

# Developmentalisme Gaya Baru Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terpasung

Shohebul Umam

Pekerja Sosial Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Shohebul.umamjr@gmail.com*

## **Abstraksi**

*Developmentalisme merupakan wacana ekonomi dan politik yang tidak ada habisnya menjadi sebuah perdebatan di dalam lanskap pemikiran pembangunan di Indonesia. Sejak Orde Baru Soeharto hingga Pasca Reformasi, diskursus pembangunanisme menjadi suatu landasan utama yang dikendarai untuk membawa bangsa Indonesia lebih maju di dalam ranah ekonomi, politik dan kesejahteraan sosial masyarakat oleh para penyelenggara negara. 'Big five' merupakan indikator kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh konsep pembangunanisme yang diperas dari pemikiran Barat, meskipun telah banyak dikritik dan mulai ditinggalkan oleh Negara Utara, akan tetapitetap menjadi sebuah kredo magis bagi Negara-Negara Selatan, khususnya Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis terhadap literature-literatur yang dibutuhkan. Langkah-langkah penyusunan penelitian ini dilakuakn secara diskriptif-argumentatif agar dapat menunjukkan titik penting konsep developmentalisme. Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa, developmentalisme dari waktu ke waktu di bawah perjalanan rezim kuasa di Indonesia selalu menjadi frame utama yang membingkai bentuk kebijakan sosial (social policy). Nahasnya, dari berbagai bentuk pembangunanisme, mulai dari sistem pembangunanisme Orde Baru sampai konsep pembangunanisme Pos-Soeharto, tidak banyak mengubah kesejahteraan masyarakat setingkat lebih baik. Kemiskinan, konflik sosial, persoalan lingkungan, HAM dan masalah sosio-spiritual, justru banyak bersemai akibat dari sistem pembangunan yang terlalu mengistimewakan pasar di bawah ideologi paling populer, neoliberalisme. Pada akhirnya, pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atau orang saja, sedangkan masyarakat kecil hanya menanggung dampak negatif dari sebuah pembangunan.*

**Kata Kunci:** *developmentalisme, social policy, kesejahteraan*

## **Abstract**

*Developmentalism is an endless economic and political discourse that becomes a debate in the landscape of development thought in Indonesia. Since Suharto's New Order until the Post-Reformation, the discourse of developmentism has become the main basis used to bring the Indonesian nation forward in the economic, political and social welfare realms by state administrators. The 'Big five' are welfare indicators used in this study, including health, education, housing, social security and social work. This research aims to look further into the concept of developmentism that was squeezed out of Western thought, although it has been widely criticized and abandoned by the Northern Countries, it remains a magical creed for Southern Countries, especially Indonesia. This study uses a qualitative approach with analytical techniques on the required literature. The steps for compiling this research were descriptive-argumentative in order to show the important point of the concept of developmentalism. The results of this study indicate that, from time to time developmentalism under the regime of power in Indonesia has always been theframe mainthat frames the form of social policy. Unfortunately, the various forms of developmentism, ranging from the New Order development system to the post-Soeharto concept of developmentism, did not change the welfare of the people to a better level. Poverty, social conflicts, environmental problems, human rights and socio-spiritual problems, are actually the result of a development system that over-*

*privileges the market under the most popular ideology, neoliberalism. In the end, development is only enjoyed by a handful of groups or people, while small communities only bear the negative impact of a development.*

**Keywords:** *developmentalism, social policy, welfare*

## **Pendahuluan**

Dinamika politik bangsa kita dari waktu ke waktu tidak memperlihatkan perkembangan yang massif. Imajinasi para elit politik seolah menjadi kering dan kehilangan daya kritisnya untuk memberi warna baru dalam laju politik bangsa Indonesia. Saat awal pembangunan mulai diiniasi pada tahun 70-an, isu yang diangkat dan dilemparkan ke dalam ruang publik adalah membangun ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera (Ghoshal, 2004, p. 506). Semua Negara Selatan, setidaknya sejak Orde Baru Soeharto isu politik yang diedarkan untuk membangun mimpi kesejahteraan sosial relative sama yakni, isu-isu seputar developmentalisme (Susetiawan, 2009, p. 3). Pada era Reformasi, setelah kran demokrasi yang sebelumnya tersumbat kembali terbuka, isu-isu tentang pembangunanisme masih menjadi primadona politik yang tetap memiliki daya tarik besar, berkuat pada isu-isu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan. Isu-isu pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu, sejak Orde Baru hingga Pasca Reformasi, tetap menjadi komoditas politik yang sering dijajakan oleh para elit politik. Menurut Rock, situasi ini menjadi fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu, pro-kapitalis dan berpihak terhadap integrasi ekonomi trans-nasional (Rock, 2003). Berangkat dari fakta ini kemudian, pada prinsipnya pergantian kekuasaan negara tidak dapat mengubah situasi kesejahteraan masyarakat yang terpasung.

Setelah lebih 50 tahun narasi pembangunan digulirkan menjadi sebuah cita-cita yang tidak selesai oleh negara, persoalan yang dihadapi Indonesia nyaris tidak berubah. Alih-alih terbangun kesejahteraan masyarakat, ketika sistem negara telah berganti dari otoritanisme sentralistis menjadi desentralisasi demokratis, kemiskinan dan korupsi tetap menjadi penyakit kronis yang tampak sangat sulit dilenyapkan. Kawamura menunjukkan bahwa, reformasi institusi pasca tenggelamnya kapal politik Soeharto pada tahun 1998 sebagai tahap awal pembangunan menuju demokrasi, tidak mengubah banyak situasi yang dihadapi bangsa Indonesia (Kawamura, 2000). Memperhatikan tingkat kemiskinan yang tetap relative tinggi, corak pembangunan dengan mengedepankan percepatan ekonomi dan infrastruktur yang menjadi hasrat utama Jokowi di dalam dua periode kekuasaannya, 'jualan' pembangunan menjadi sesuatu yang nisbi dan tidak menjadi jawaban atas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Proyeksi pembangunan gaya baru Jokowi, yang memprioritaskan investasi asing di ranah ekonomi, dan percepatan pembangunan infrastruktur, secara implisit melemparkan bangsa Indonesia ke masa lalu, di mana nafsu besar Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan hasrat pembangunan Jokowi (Warburton, 2016, p. 301). Korupsi, konflik sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebutuhan industri ekstraktif yang berkelanjutan, menjadi persoalan yang terus melebar semakin luas di bawah rezim pembangunan gaya baru Jokowi. Developmentalisme sebagai kredo politik oleh karena itu, hanya menjadi mimpi kesejahteraan bagi masyarakat miskin, sementara angina perubahan terus berderu ke arah kelompok oligarki dan kapitalis.

Pada posisi ini kemudian, kenapa developmentalisme tetap menjadi narasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia hingga sampai saat ini. Sementara di saat yang sama, teroi pembangunan merupakan satu konsep yang terbukti gagal untuk membawa perubahan *welfare state*. Pikiran Barat yang mendasari konsep ini, sudah lama ditinggalkan oleh negara yang melahirkannya. Sementara di Indonesia, para penyelenggara negara tetap intim dengan kaidah-kaidah developmentalisme. Sementara itu, tidak ada refleksi baru terhadap corak ide dan cita-cita pembangunan yang diusung. Perluasan pasar melalui

ideologi neoliberalisme, berkait kelindan dengan pembangunan negara. Industrialisasi di bidang ekstraktif terus menajamkan taringnya untuk menghabiskan komoditas alam negara Indonesia, sementara pesar dikuasai oleh oligarki lokal ataupun nasional. Pada sisi yang sama, kesejahteraan sosial masyarakat pun juga tidak memperlihatkan sesuatu yang baik dan positif. Arus globalisasi menjadi hembusan paling dualis bagi negara-negara Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Kapitalisme-industrial yang telah memupuk globalisasi dan industrialisasi sebagai ilham universal dengan berbagai bentuknya memiliki implikasi besar terhadap dinamika politik, struktur kebijakan dan pola kesejahteraan masyarakat negara. Sementara pada sisi yang lain, kebijakan sosial (*social policy*) menurut Jamrozik merupakan suatu mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat, agar dapat mencapai hasil yang diinginkan, di mana di dalamnya ada keterkaitan antara objektif dan tujuan masyarakat, yang dicapai melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang dominan di masyarakat (Isbandi, 2013, p. 47), justru semakin sempit. Neoliberalisme melalui segala pernik-perniknya, mampu memaksa kebijakan sosial menjadi jauh dari akar nilai-nilai negara bangsa.

Pada posisi ini kemudian, developmentalisme yang diproyeksikan melalui kaidah-kaidah neoliberalisme, melahirkan dualisme ekonomi yang menjadi persoalan mendasar bangsa Indonesia dari satu rezim ke rezim kuasa lainnya. Pembangunan industrialisasi modern menjadi prioritas pemerintah, sedangkan ekonomi kerakyatan menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Pada akhirnya, pembangunan yang mengedepankan percepatan ekonomi dan infrastruktur, melahirkan masalah multidimensional. Masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pembangunan dan kebijakan pemerintah itu sendiri, akibat dari sasaran utama pemerintah dalam menentukan kerja dan kebijakannya, disimpulkan melalui langkah reduksi atas ide *developmentalism* dan industrialisasi-neoliberalisme.

## Metode

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada riset kualitatif dengan menggunakan pendekatan pada literatur atau riset-riset yang sebelumnya telah dilakukan oleh para ekspertis yang kompeten di dalam diskursus politik dan wacana developmentalisme. Sehingga peneliti melakukan analisis terhadap literatur-literatur yang tersedia yang menggambarkan realitas di lapangan dan liner dengan realitas teori. Seperti yang dikatakan oleh J.R. Raco bahwa, untuk mengangkat suatu kebenaran di dalam masyarakat, maka persepsi peneliti harus dapat memaparkan realitas sosial menjadi realitas teoritis secara objektif (Raco, 2010). Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin kemudian direduksi untuk memadatkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya, hasil penelitian ini disusun dengan cara deskriptif-argumentatif, supaya data yang disajikan menjadi relevan dengan pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini, baru kemudian ditarik suatu kesimpulan, yang biasa disebut dengan metode triangulasi data (Sarosa, n.d., pp. 3–4). Diskursus mengenai developmentalisme merupakan kajian makro yang menggunakan pendekatan ekonomi-politik.

Peneliti kualitatif akan menemukan banyak sekali kesimpulan saat penelitian berlangsung, kesimpulan bersifat skeptif hingga kesimpulan benar-benar mencapai puncaknya setelah ditentukan kevalidan atau keabsahannya. Teknik validitas bisa dilakukan dengan cara melakukan kajian ulang terhadap informasi yang telah diperoleh, mencocokkan dengan data-data lainnya, melakukan diskusi atau tukar pikiran dengan teman yang dianggap memiliki pengetahuan terkait tema penelitian, kemudian menarik kesimpulan setelah data-data benar-benar dibuktikan keabsahannya (Agusta, 2003, pp. 10–11).

Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini merupakan kajian-kajian atau literatur yang membahas secara kritis tentang developmentalisme. Literatur yang dijadikan sebagai pedoman data di dalam tulisan ini meliputi karya-karya sarjana di dalam negeri, hingga ekspertis yang

berasal dari luar negeri yang memfokuskan kajian developmentalisme di dalam perjalanan ekonomi dan politik di Indonesia mulai dari Orde Baru hingga saat ini. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjadi sebuah karya yang bersifat makro dengan menekankan pada analisis dan argumen terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial.

## **Hasil dan Pembahasan Developmentalisme Gaya Baru**

Narasi tentang pembangunan hingga sampai saat menjadi persoalan yang demikian pelik karena berkait-kelindan dengan segala sisi kehidupan masyarakat dalam menjalani aktivitas sosial, politik, ekonomi dan budaya. Selain itu, imajinasi dan ide tentang pembangunan yang dikonstruksi menjadi langgam politik, menjadi sesuatu yang bersifat penting dan genting untuk dibaca ulang dan direspon dengan kritis dan proporsional. Sebab bagaimana pun, narasi sekaligus imajinasi tentang pembangunan sebagai proyeksi untuk memutus kemiskinan dan membangun kesejahteraan masyarakat, hanya bercokol dan berhenti pada dimensi idealisme *an sich*, dimana isu-isu pembangunan terlalu banyak diseret dan dihabiskan sebagai wacana politik hingga sampai saat ini—dan yang pasti—jualan politik dengan imajinasi pembangunan itu tidak menunjukkan sesuatu dampak yang positif terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, di mana kemiskinan masih menjadi persoalan yang tak kunjung terpecahkan.

Krisis pembangunan yang terjadi sejak Orde Baru sampai saat ini, pada dasarnya merupakan bagian dari krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain, yang telah terjadi di dalam lipatan-lipatan waktu berates-ratus tahun yang lalu. Proses sejarah dominasi itu dapat kita klasifikasikan menjadi tiga priode formasi sosial yaitu, fase kolonialisme, fase neokolonialisme, dan neoliberalisme (FAKIH, 2002). Pada konteks ini, Indonesia secara *de jure* telah berdaulat dan keluar dari bentuk kolonialisme fisik. Akan tetapi secara *de facto*, bangsa Indonesia tenagah berada di dalam dimensi penjajahan non-fisik, atau neokolonialisme melalui serangan yang dilancarkan melalui cerobong neoliberalisme.

Pada dimensi yang pertama yaitu, kolonialisme, di mana perkembangan kapitalisme di Eropa mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Berangkat dari fase inilah kemudian, kisah tentang dominasi manusia terjadi dalam bentuk yang menakutkan, yaitu penjajahan secara langsung selama ratusan tahun. Perang merupakan pilihan terakhir narasi ini untuk menyempurnakan kepentingan pembangunan dan ekonomi. Bahan baku dan segala materi yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita kapitalisme menjadi terpenuhi hanya melalui perampasan dan penundukan terhadap bangsa lain yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia (Fakih, 2002). Setelah berakhirnya era kolonialisme ini, dunia memasuki era neokolonialisme. Dominasi terhadap manusia yang lain menyiratkan modusnya yang lain, dimana modus dan segala bentuk penjajahan tidak lagi bertumpu pada fisik, melainkan melalui penjajahan teori, dan ideologi. Fase inilah yang kita sebut sebagai fase *developmentalisme*. Periode ini adalah fase dimana kemerdekaan secara fisik dapat direngkuh sepenuhnya oleh negara-negara jajahan, tetapi pada dasarnya negara-negara kolonialis masih melanggengkan dominasi dan penjajahannya melalui teori dan perubahan sosial (Fakih, 2002).

Dalam kaitan inilah sesungguhnya, isu-isu pembangunan—bahkan sampai saat ini—atau pun paham *developmentalism* menjadi bagian dari media dominasi, sebab—tanpa disadari—teori (ilmu pengetahuan) tersebut direkayasa untuk menjadi paradigma atau cara pandang paling dominan untuk perubahan sosial Negara-negara Selatan. Pada saat yang sama, paradigma yang telah disiapkan dan didesain untuk dominasi itu menjadi sebuah hegemoni, yakni dominasi cara pandang itu melalui ilmu pengetahuan. Sementara hegemoni, merujuk pada asumsi Gramsci bahwa, Hegemoni diraih secara politis

dan melalui upaya-upaya kultural dan intelektual untuk menciptakan uniformitas pandangan dalam sebuah masyarakat (Malik, 2001; 120). Gagasan demi gagasan yang berusaha diartikulasikan dan dikontekstualisasikan, tumbuh dari sumber dominan yang secara tidak sadar membekap Negara-negara Selatan untuk berada di bawah kendali yang tidak disadari.

Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, sejak Revolusi Industri, perubahan model produksi (*mode of production*) yang dibangun melalui teknologi permesinan tidak pernah berhenti untuk menciptakan kebutuhan masyarakat (Susetiawan, 2009, p. 7). Dalam upaya menjaga kebangkrutan akibat dari massifnya produksi (*over production*) pasar harus diciptakan menembus batas-batas negara di dunia. Namun perluasan pasar itu tidak berjalan secara sederhana karena setelah perang dunia II ada persaingan ideologis antara kapitalisme di satu sisi dan sosialisme/komunisme di sisi yang lain. Hingga pada akhirnya krisis yang berkepanjangan menimpa kapitalisme awal pada abad XIX, hal ini berdampak pada krisis ekonomi pada tahun-tahun 30-an (FAKIH, 2002, p. 186). Oleh sebab itulah kemudian, kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital. Maka, strategi paling shahih untuk mengantarkan hajat itu adalah, menyingkirkan segala bentuk rintangan investasi dengan pasar bebas. Untuk memuluskan rencana itu diperlukan tatanan perdagangan global, sejak saat inilah gagasan tentang globalisasi dan industrialisasi dimunculkan.

Oleh sebab itulah kemudian, perluasan pasar yang menjadi cita-cita paling besar yang dilahirkan dari rahim kapitalisme itu, membutuhkan kerja politik sebagai instrument yang paling tepat dan efisien, agar perluasan pasar mampu menembus batas-batas negara. Jadi, ide dan imajinasi pembangunan adalah satu entitas yang diperah dari rahim kapitalisme, sebagai bagian dari pernak-pernik kerja politik. Pada bagian ini kemudian, dapat dilihat tujuan utama pembangunan sejak awal diinisiasi sebagai wacana diskursus ekonomi dan politik, hanya ditujukan sebagai alat perluasan pasar. Jadi cita-cita pembangunan yang diorientasikan pada pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera oleh negara-negara Selatan, dalam hal ini adalah Indonesia, tidak terbukti samasekali (Carnegie, 2008, p. 354), karena ide pembangunan itu sendiri tidak lahir secara orisinal dari khazanah berpikir bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itulah kemudian, persoalan kemiskinan—yang menjadi cita-cita pembangunan—masih demikian tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 860.000 orang (0,26 persen) dibanding dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Kepala BPS Suryamin mengatakan, selain mengukur jumlah penduduk miskin dan persentasenya, BPS juga mengukur indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 meningkat dibandingkan Maret 2012, Maret 2013, dan Maret 2014. Makin besar indeks keparahan kemiskinan, maka beda pengeluaran antar penduduk miskin makin jauh, tidak terkumpul pada satu angka. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah 0,535, meningkat dari Maret 2014 yang ada di level 0,435, Maret 2013 (0,432), dan Maret 2012 (0,473) (Wulandari, 2016). Sementara pada tahun 2020, angka kemiskinan berada di angka 10,9 persen (Badan Pusat Statistik, 2021), angka ini menunjukkan fluktuasi angka kemiskinan di Indonesia yang tidak bergeser secara signifikan sejak tahun 2012. Artinya, persoalan kemiskinan tidak bisa dijawab oleh proyek pembangunanisme pemerintah dari tahun ke tahun yang selalu mengedepankan narasi *developmentalisme*.

Keadaan ini tidak membuat negara dan pemerintah menyadari bahwa, konsep pembangunan ala pikiran Barat yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi tidak *appropriate* dengan keadaan bangsa Indonesia. Dinamika politik dan budaya berpikir negara oleh sebab itu, menjadi hal paling menentukan terhadap kondisi kemiskinan sekaligus kesejahteraan masyarakat. Dimensi politik, seiring dengan geliat

perluasan pasar—disadari atau pun tidak—berjalan mengikuti ritme dan prinsip neoliberalisme yang tidak mungkin bisa diimbangi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang notabene adalah petani dengan pendidikan menengah ke bawah. Kerja politik melalui sistem pasar menjadi kunci penting yang tidak bisa diimbangi oleh kekuatan masyarakat Indonesia. Pada sisi yang lain, konstruksi organisasi global untuk mengatur tata dunia tunggal, semisal Bank Dunia (*world bank*) dan IMF (*International Monetary*), dalam memberikan dukungan dana pembangunan melalui sistem hutang bagi Negara Selatan, mendesain segala bentuk kebijakan sosial berdasarkan prinsip-prinsip perluasan pasar agar mendapatkan sponsor dan dukungan modal pembangunan. Sesuatu yang sekali lagi tidak bisa diakses oleh masyarakat, tetapi dioperasikan oleh kelompok-kelompok elit dan oligarki nasional.

Itulah sebabnya, pola pembangunanisem sejauh ini tidak dapat mengubah apapun situasi yang dihadapi masyarakat yakni, kemiskinan. Orientasi kebijakan sosial yang diproduksi oleh negara, berkelindan di dalam kepentingan antara elit negara dengan ekonomi global. Sehingga, arus kehendak masyarakat pada umumnya, dalam hal ini adalah masyarakat miskin, tidak dapat dicover oleh sistem kebijakan yang diproduksi oleh negara dari waktu ke waktu di bawah kekuasaan yang berbeda-beda. Percepatan pembangunan melalui ekonomi dan infrastruktur, tidak banyak memberikan dampak kepada masyarakat kecil, dan hanya dinikmati dan memperluas industrialisasi di level masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Sementara masyarakat miskin, kelompok yang paling banyak menanggung dampak negative dari sistem pembangunan gaya baru ini. Konflik sosial antar kelompok masyarakat, kemiskinan, masalah lingkungan hidup, dan lain sebagainya terus bertumbuh dengan wajah dan motif yang baru akibat dari proses pembangunan yang terus digalakkan dan tidak akan pernah sesai.

### **Kesejahteraan yang terpasung**

Berbicara tentang kesejahteraan sosial, hal utama yang penting untuk diingat adalah, kesejahteraan sosial seperti yang diasumsikan oleh Spicker bahwa, ada lima aspek penting yang mendasari indikator kesejahteraan sosial. Kelima aspek ini dikenal dengan nama “*big five*” yaitu: *kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial* (Spicker, 2000, p. 121). Asumsi ini berjalan lurus dengan persepsi Undang-Undang nomer 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yaitu, terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual, menjadi tanggung jawab negara karena telah diatur secara legal konstitusional (Setiawan, 2017, p. 274). Jadi sangat jelas sekali bahwa, kesejahteraan sosial yang berusaha dikonstruksi oleh para pengambil kebijakan negara, pada dasarnya lebih luas dari asumsi Paul Spicker, karena secara umum lebih menekankan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji indikasi kesejahteraan sosial, misalnya, aspek fisik, aspek ketenagakerjaan, aspek ekonomi hingga aspek kesejahteraan spiritual masyarakat, guna menopang seluruh aspek-aspek masyarakat yang komprehensif.

Jadi pada posisi ini kemudian, dapat kita lihat apakah pembangunan yang diproyeksikan oleh pemerintah dari satu rezim ke rezim lainnya hingga sampia saat ini, dapat membuktikan telah memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat di dalam semua aspek, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Alih-alih membangun kesejahteraan masyarakat di semua sektor kehidupan untuk tunduk pada amanah Undang-Undang, kebijakan pembangunan dari waktu ke waktu, telah menimbulkan kesulitan masyarakat di dalam semua dimensi kehidupan. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, lingkungan, hingga persoalan spiritual meliputi wacana corak keberagaman masyarakat Indonesia yang beragama, sejauh ini masih compang-camping. Isu radikalisme terutama, menjadi suatu bukti bahwa negara tidak mampu membangun kesejahteraan masyarakat seperti diatur di dalam Undang-Undang. Gencarnya kelompok-kelompok ekstrim-intoleran melakukan propaganda dan

ancaman, selain sebagai bentuk pertarungan kaidah keagamaan, ia adalah seruan kritik terhadap pemerintah yang tidak dapat menumbuhkan ekonomi yang setara dan adil, di mana pembangunan tidak menyentuh kepentingan masyarakat miskin, tetapi lebih intim dengan kepentingan korporasi dan kapitalisme. Hasan dalam hal ini mengatakan, bertumbuhnya kelompok-kelompok radikal di Indonesia setidaknya sejak Orde Baru Soeharto, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga kelompok-kelompok Islam intoleran berusaha menawarkan ideologi khilafatisme sebagai jalan baru untuk membangun kesejahteraan sosial yang berkeadilan (Hasan, 2006).

Kebijakan-kebijakan sosial (*social policy*) yang direduksi dari dinamika politik yang mengikuti prinsip-prinsip perluasan pasar—dalam hal ini adalah neoliberalisme—menjadi jauh dari nilai-nilai masyarakat, sehingga lambat laun memantik respon negative dari kelompok-kelompok akar rumput (*grass root*), tidak terkecuali kelompok-kelompok radikal yang menunggangi isu-isu kesejahteraan sosial dan keadilan. Seperti asumsi Jamrozik tentang kebijakan sosial bahwa, kebijakan sosial (*social policy*) merupakan suatu mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya agar masyarakat dapat mencapai hasil yang mereka inginkan, dimana di dalamnya ada keterkaitan antara objek dan tujuan masyarakat, yang dicapai melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang dominan di masyarakat tersebut, serta pada sisi berikutnya akan memperkuat nilai-nilai dominan pada masyarakat terbut pula (Jamrozik, 2009). Alih-alih memperkuat nilai-nilai di dalam masyarakat, nilai-nilai yang dikonstruksi menjadi kebijakan sosial—jika dihayati—tidak benar-benar menunjukkan nilai-nilai masyarakat Indonesia. dalam kasus ini, kita dapat mengambil satu contoh pada sektir ekonomi yang menjadi persoalan fundamental, kebijakan yang mengatur (*social policy*) dalam wilayah ini, tidak diarahkan untuk menciptakan perekonomian rakyat yang egaliter, kolektifis dan berkeadilan, melalui ideologi perekonomian yang bersifat pancasilais, memberdayakan petani sebagai populasi sekaligus profesi terbesar di negara Indonesia (Sumawinata, 2004, p. 161).

Penting untuk dicermati kembali bahwa, ekonomi yang pancasilais adalah, ekonomi yang berorientasi pada sila-sila daripada Pancasila, yaitu berorientasi pada: *Ketuhanan Yang Maha Esa* (adanya etik moral agama, bukan materialism); *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab* (tidak mengenal pemerasan/eksploitasi, modernisasi); *Persatuan* (kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royog, tidak saling mematikan, bantu-membantu antara yang kuat dan yang lemah, nasionalisme dan patriotism ekonomi); *Kerakyatan* (demokrasi ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta *Keadilan Sosial* (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang) (Mohammad, 1985, p. 153). Cita-cita ekonomi ini, samasekali tidak tergambar di dalam sistem perekonomian yang didorong habis-habisan oleh negara. Proyek pembangunan ekonomi Jokowi yang menekankan pada pembangunan percepatan ekonomi, justru mengistimewakan pasar, di mana investor asing menjadi primadona yang dianggap paling menjanjikan untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat. hal ini dibuktikan dengan hasrat Jokowi yang telah membuka pintu selebar-lebarnya, dan memberikan rekomendasi kepada para investor asing untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya lama di Indonesia secara lebih massif (Asmara, n.d.). Kebijakan ini berdampak sangat serius terhadap kesejahteraan masyarakat, karena lingkungan di mana masyarakat dapat mengakses sumber daya untuk menopang kehidupan (Lee, 2021) disegregasi oleh kepentingan korporasi. Industri ekstraktif, menimbulkan ketergantungan terhadap komoditas alam Indonesia yang berkelanjutan, sehingga proyek investasi akan terus menargetkan komoditas alam Indonesia, dan pada saat yang sama membuat akses masyarakat kecil terhadap sumber daya lam semakin sempit (Indonesia, n.d.), suatu hal yang menyeret masyarakat pada situasi yang tidak menguntungkan.

Realitas ini menjadi bukti bahwa, sistem perekonomian kita—sekali lagi—sangat jauh dari nilai-nilai yang pancasilais yang mandiri, berdaulat adil dan makmur. Akan tetapi, justru tidak berdaya dan meringkuk di bawah sistem perekonomian yang mengistimewakan pasar dan investor, di bawah sistem neoliberalisme yang jauh dari nilai-nilai kekeluargaan dan kolektifis, seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bayangan tentang kesejahteraan masyarakat seperti yang diinesiasi oleh Fitzspatrik di atas, dimana ada enam aspek penting untuk sampai pada kondisi sejahtera yaitu, *kebahagiaan*, *jaminan* (meyangkut pendapatan, pekerjaan, dan perumahan), *pilihan* (terkait dengan kesempatan sosial (*social opportunity*) yang dapat diraih di dalam kehidupan), kebutuhan, dikategorikan menjadi tiga (3) yaitu, kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Asepek selanjutnya adalah, *desert*, dimaknai sebagai kelayakan bagi individu untuk menerima hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi tindakan sosialnya, asepek yang terkahir, *perbandingan*, relatif diartikan sebagai, kesejahteraan bukan kondisi yang absolut, melainkan ada nilai relativitas di dalamnya (Fitzpatrick, 2011, p. 16).

Cita-cita untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat, dengan menekan angka kemiskinan pada tingkat paling minimal, melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur, yang diproyeksikan melalui kaidah-kaidah neoliberalisme, justru membuat kesejahteraan masyarakat menjadi terpasung di bawah cengkraman kepentingan ekonomi global. Equalitas ekonomi yang diharapkan dapat tercipta melalui distribusi pembangunan, justru pada kenyataannya melahirkan kisah pilu yang baru. Mulai dari masalah kemiskinan, kemanusiaan, HAM karena persoalan lingkungan hidup, hingga masalah kesejahteraan sosio-spiritual masyarakat semakin memburuk di bawah kebijakan sosial yang mengarusutamakan pasar dibandingkan kekayaan lokal bangsa Indonesia.

## **Kesimpulan**

Ide pembangunan (*developtmentalisme*) melalui percepatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejauh ini hanya berkembang sebagai isu yang terlalu *shopisticated* yang tidak memperbaiki situasi yang dihadapi oleh masyarakat kecil. Proyek pembangunan yang berlandaskan kaidah-kaidah neoliberalisme yang mengistimewakan pasar, hanya menguntungkan bagi kelompok-kelompok oligarki dan kapitalis di dalam menggemukkan modal. Konsep pembangunan sejak Orde Baru hingga sampai saat ini ketika institusi dan sistem negara telah berubah, konsep pembangunan sebagai ide yang tidak lahir dari khazanah berpikir cendekia bangsa Indonesia, melainkan ide yang diperas oleh para cerdas-pandai negara-negara Utara, sebagai instrument untuk perluasan pasar dan kapitalisme, terbukti masih bekerja dengan baik di Indonesia. Wacana pembangunan masih menjadi magnet kuat menarik simpati masyarakat, meskipun konsep ini sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara yang memproduksinya dulu.

Dalam situasi ini, tampak bahwa negara Indonesia masih tidak memiliki kemerdekaan berpikir untuk menentukan ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Suatu gambaran besar bahwa, bangsa ini masih terjajah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebijakan sosial, dinamika politik masih mengikuti langgam wacana lama yang sudah usang dan tidak terbukti membawa kesejahteraan sosial yang egaliter. Sehingga kesejahteraan sosial masyarakat menjadi terpasung, sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk keluar dari lingkaran itu. Isu pembangunan beserta cita-cita yang dibawanya hanya merupakan imajinasi kesejahteraan bagi masyarakat kecil, dan kenyataannya hanyalah milik korporasi dan kapitalis.

Membangun kesejahteraan sosial masyarakat oleh sebab itu, tidak bisa melalui cara dan nilai-nilai yang jauh dari masyarakat Indonesia sendiri. Oleh sebab itulah kemudian, independensi dalam ekonomi, seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila melalui ideologi ekonomi yang Pancasila, akan menjadi langkah besar untuk menggiring bangsa kita berdikari, baik secara ekonomi ataupun politik. Membangun Indonesia dari penggir, tidak berarti harus dari hal-hal yang besar, tetapi melalui kekayaan nilai yang ada di dalam diri bangsa sendiri, melalui kearifan lokal (egalitarianisme, kolektifitas, solidaritas dan kekeluargaan) yang dapat ditempatkan ke dalam dimensi global, sebagai wajah autentik bangsa Indonesia.

### Daftar Pustaka

Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*, 1(2), 1–12.

Asmara, C. G. (n.d.). *Pamer Omnibus Law di WEF, Jokowi Undang Investor Asing ke RI*. News. Retrieved June 27, 2021, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201125200812-4204688/pamer-omnibus-law-di-wef-jokowi-undang-investor-asing-ke-ri>

Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

Carnegie, M. (2008). Development prospects in Eastern Indonesia: Learning from Oelua's diverse economy. *Asia Pacific Viewpoint*, 49(3), 354–369. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2008.00383.x>

Fakih, M. (2002). *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Pustaka Pelajar.

FAKIH, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Pustaka Pelajar. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/10829>

Fitzpatrick, T. (2011). *Welfare Theory: An Introduction to the Theoretical Debates in Social Policy*. Macmillan International Higher Education.

Ghoshal, B. (2004). Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 26(3), 506–529.

Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. SEAP Publications.

Indonesia, C. N. N. (n.d.). *LSM: Penebangan Hutan di Papua Naik Saat Era Jokowi*. Nasional. Retrieved July 5, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211112741-20-605168/lsm-penebangan-hutan-di-papua-naik-saat-era-jokowi>

Isbandi, R. A. (2013). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers.

Jamrozik, A. W. (2009). *Social policy in the post-welfare state: Australian society in a changing world*. Pearson Education Limited.  
<https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/58170>

Kawamura, K. (2000). *Political Reform in the Post-Soeharto Era* (SSRN Scholarly Paper ID 1742678). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=1742678>

Lee, S. Y. (2021). An Urban Explanation of Jokowi's Rise: Implications for Politics and Governance in Post-Suharto Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 1868103421990853.  
<https://doi.org/10.1177/1868103421990853>

Malik, Abd. H. (2001). *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Everoes Press.

Mohammad, H. (1985). *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*. UI-Press.

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.

Rock, M. T. (2003). *The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia* (SSRN Scholarly Paper ID 470082). Social Science Research Network.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.470082>

Sarosa, S. (n.d.). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.

Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>

Spicker, P. (2000). *The Welfare State: A General Theory*. SAGE.

Sumawinata, S. (2004). *Politik ekonomi kerakyatan*. Gramedia Pustaka Utama.

Susetiawan. (2009). *Kesejahteraan Masyarakat Yang Terpasung: Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>

Wulandari, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Kendari Tahun 2014. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1).